

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan dan Saran

5.1.1 Kesimpulan

Sesuai dengan Akuntabilitas Proses tersebut terkait apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam system informasi akuntansi, sistem informasi dalam menyampaikan informasi pembayaran Iuran kepada peserta BPJS dan sistem informasi administrasi berupa kelengkapan berkas di informasikan ke peserta BPJS, hal tersebut berkaitan dengan Akuntabilitas Proses menurut Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2009 :21).

Bedasarkan Akuntabilitas program pada masyarakat untuk ikut dalam program BPJS Kesehatan yang diduga seperti yang terjadi pada asuransi kesehatan pada umumnya tidak perlu terjadi karena BPJS Kesehatan cukup transparan dan akuntabel, dalam hal kelengkapan berkas untuk ketentuan persyaratan berkas pada program yang dilakukan pihak RS pada peserta BPJS untuk pelaporan pada akhir tahun. Hal tersebut berdasarkan Akuntansi Program menurut Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2009 :21).

Tidak berbeda jauh dengan proses Akuntabilitas Kebijakan yang ada di RS tersebut sesuai dengan hasil penelitian kebijakan atau aturan pada pengelolaan dana BPJS sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ada di RS Aloe Saboe dari segi pencatatan sudah sesuai kebijakan dan telah menggunakan kebijakan standar akuntansi Pemerintah.

Akuntabilitas atau Pertanggung Jawaban merupakan bentuk kewajiban di setiap aturan untuk melakukan pencatatan pengelolaan dana BPJS, pengelolaan tersebut sesuai dengan aturannya tanpa di pengaruhi dari pihak luar dan harus selalu jujur dalam pengelolaan dana sesuai prosedur administrasi Akuntansi.

Akuntabilitas pengelolaan dana BPJS di RS mempunyai pelaporan yang sesuai dengan pencatatan berdasarkan Kebijakan dan Aturan yang sesuai dengan aturan pemerintah itu sendiri, terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam system informasi akuntansi, sistem informasi dalam menyampaikan informasi berupa kelengkapan berkas di informasikan ke peserta BPJS.

5.1.2 Saran

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan paradigma interpretatif terdapat keterbatasan didalamnya. Berdasarkan pertimbangan keterbatasan yang ada pada penelitian ini di harapkan kepada peneliti selanjutnya agar bisa dapat mengkaji lebih mendalam lagi terkait materi Akuntansi sehingga dapat meneliti proses Pengelolaan dana BPJS dalam Perspektif Akuntansi di RS Aloe Saboe apakah sudah sesuai aturan akuntansi ataupun sudah sesuai Prinsip dan Kaidah Akuntansi yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aria, G. I. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Air Mandidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua)*.
- Dangkua, I. (2011). Efektivitas Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Di Kabupaten Gorontalo
- Dewi Maharani Indah Reswari <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-akuntansi-dan-pentingnya-dalam-bisnis/> PUBLISHED 26 Dec 2019
- Ernawati. (2018). Studi Komparatif Metode Istibat Nahdlatul Ulama Dan Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Bpjs Kesehatan (Skripsi). Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo
- Fany A.&Yumniati A. (2018),*Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada CV SARANA ADI PUTRA*
- Hidayat, W. (2008), Peranan Prinsip Akuntansi Berterima Umum Dalam Kepatuhan Pedoman *Good Corporate Governance*. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*. 5(1)
- Junaidi, Mediansyah, & Yaqin, A. (2018). *Analisis Kesiapan Masyarakat dalam Mendukung Program JKN-KIS oleh BPJS Kesehatan di Kabupaten Sumenep (Studi Kasus Kecamatan Pragaan, Guluk-Guluk, Ganding)*. 2(1), 38–65.
- Mardiasmo, (2009) .Akuntansi Sector Publik.: CV Andi Offset
- Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019
- Prayoga, I. K. D. C., Satriadi, K. R. K., Putri, N. P. A. A., Wijayanana, G. K. A. A., & Putra, P. W. A. (2019). Proses Pengajuan Anggaran Oleh Dinas Kesehatan

- Kabupaten Buleleng Dalam Menunjang Masyarakat Tidak Mampu Yang Belum Memiliki Kartu Indonesia Sehat (Kis). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(2), 181–187. <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i2.19882>
- Rajagukguk, T., & Siregar, S. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan BPJS Kesehatan Terhadap Pelayanan Puskesmas (Type Perawatan) Di Kota Medan. *Jurnal Manajemen*, 5(2), 205–214.
- Sari, C. M., Nining, & Suarna, N. (2019). Sistem Informasi Akuntansi Pencatatan Piutang Menggunakan Metode Langsung Pada Rsd Waled 1camelia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sari, W. (2017). Sistem Dan Prosedur Pembuatan Kartu Indonesia Sehat Pada Dinas Sosial Kabupaten Sleman (Laporan Praktek Kerja) Yogyakarta : Universitas Teknologi Yogyakarta
- Saputra, D. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi. *Jurnal Valuta*, 4(2)
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfa Beta
- Suhita, D. (2014). *Transparansi, Akuntabilitas Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Surakarta. I(26)*.
- Sukardi, D. (2016). Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), 96–104.
- Syari'ah dan Hukum, Volume 16, Nomor 2 Desember 2018 : 284 – 306*

- Wayan, N., Apriliani, N., Ratmaja, K. G., Tri, H., Astiti, M., Ayu, I., ... Handayani, N. (2018). *IMPLEMENTASI PERATURAN BPJS TERHADAP PELAYANAN BULELENG*. 8(2), 104–114.
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, 19(1), 1–16.